



PATTIRO
BANTEN



Program Studi
Ilmu Komunikasi

BANTEN OUTLOOK 2024

POTRET
PEMBANGUNAN
BANTEN
SATU DEKADE



www.pattirobanten.or.id



@pattiro-banten



@pattirobanten



@pattiro.banten

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
Gambaran Umum	1
Ruang Lingkup	2
Tujuan	2
II. Kemandirian Keuangan Daerah.....	3
III. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	13
Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	21
Angka Harapan Hidup (AHH)	26
IV. Laju Pertumbuhan Ekonomi	31
V. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	37
VI. Tingkat Kemiskinan.....	43
VII. Pembangunan Lingkungan : Anggaran Berbasis Ekologis	49
VIII. Pembangunan Sosial : Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	53
IX. Pembangunan Prioritas : 24 Pembangunan Desa Terendah	58
X. Kesimpulan	62
Rekomendasi Teknis	64
Rekomendasi Kebijakan	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kemandirian Keuangan Daerah.....	3
Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
Tabel 3 Kontribusi IPM di setiap Kabupaten dan Kota.....	17
Tabel 4 Rata - Rata Lama Sekolah	20
Tabel 5 Harapan Lama Sekolah.....	21
Tabel 6 Angka Harapan Hidup	26
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Daerah.....	31
Tabel 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	37
Tabel 9 Tingkat Kemiskinan	43
Tabel 10 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	54
Tabel 11 24 Desa Prioritas	59

BANTEN OUTLOOK 2024

POTRET PEMBANGUNAN BANTEN SATU DEKADE

Pengarah : - Ail Muldi Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi UNTIRTA

- Panji Bahari Noor Romadhon PATTIRO Banten

Koordinator : Martina Nursaprudianti

Kontributor : - Muhamad Sopyan

- Muhammad Rifaldi

- Bella Rusmiyanti

- Andhika Juniawan

- Lia Ningsih

- Amar Hamdani

Editor : - Nouval

- Angga Andrias

- Amin Rohani

- Panji Bahari Noor Romadhon

Mitra Bestari: - Ail Muldi Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi UNTIRTA

I. PENDAHULUAN



I. Pendahuluan

- **Gambaran Umum:**

Provinsi Banten merupakan wilayah strategis yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dengan potensi besar di sektor pariwisata, industri, dan agrikultur. Namun, Banten menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

CATAHU Banten 2024 disusun di tengah momentum penting pergantian kepala daerah hasil Pilkada 2024. Sebelumnya, beberapa wilayah di Banten dijabat oleh Penjabat (Pj) kepala daerah, termasuk Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Pergantian ini menjadi kesempatan strategis untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan menetapkan arah kebijakan yang lebih terarah bagi masa depan provinsi.

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk dampak Pemilu dan Pilkada 2024, yang membawa dinamika sosial-politik di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, pandemi COVID-19 yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir meninggalkan dampak signifikan pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ketimpangan pembangunan antar wilayah urban dan agraris, degradasi lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dan keadilan sosial menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini.

Hasil evaluasi mencatat berbagai aspek kunci pembangunan yang membutuhkan perhatian serius. Di sektor makro pembangunan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah agraris seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak, sementara wilayah urban seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan menunjukkan keberhasilan diversifikasi ekonomi berbasis jasa. Kemiskinan secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, namun disparitas antar wilayah tetap signifikan, mencerminkan tantangan struktural yang harus segera diatasi.

Salah satu perangkat indikator yang dikembangkan dalam indeks desa membangun yaitu kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa dari mulai adanya kemudahan akses dan pelayanan pendidikan, dan kesehatan,

sehingga adanya pemerataan dan keadilan. Dalam bidang sosial, isu pendidikan dan kekerasan memerlukan pendekatan lebih strategis. Meskipun rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meningkat, akses pendidikan di daerah terpencil masih terbatas.

Di sisi lain, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencerminkan lemahnya penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) serta perlunya optimalisasi kanal pelaporan seperti SIMANIS. Di bidang ekologi, masalah utama meliputi pencemaran industri, degradasi tutupan hutan, dan pengelolaan limbah. Implementasi skema insentif fiskal berbasis ekologi atau Ekologi Fiskal Transfer (EFT), dengan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), menjadi peluang besar untuk memperkuat pelestarian lingkungan.

Melihat keseluruhan evaluasi ini, pembangunan Banten membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data untuk menjawab tantangan di berbagai sektor. Kepala daerah terpilih harus mampu memprioritaskan solusi inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

- **Ruang Lingkup:** Catatan ini mencakup analisis indeks kemandirian keuangan daerah, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, pembangunan lingkungan, pembangunan sosial kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pembangunan prioritas 24 desa.
- **Tujuan:**
 1. Memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan di Banten, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 2. Mengidentifikasi tantangan utama dan peluang strategis untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang.
 3. Menyediakan rekomendasi berbasis data bagi kepala daerah terpilih untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.
 4. Mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pembangunan berbasis keberlanjutan.

II. KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH



II. Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1
Kemandirian Keuangan Daerah

Daerah	Keteran gan	Tahun											Kinerja		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahu n Terak hir	3 Tah un Awa l	3 Tah un Akhi r
Banten	Indeks Kemandi rian Keuanga n Daerah	69.31%	67.86%	63.11%	59.31%	61.33%	62.69%	52.71%	62.56%	73.21%	73.55%	69.26%	- 0.05 %	- 6.20 %	- 3.94 %
	Kemamp uan Keuanga n	Sedang													
	Pola Hubung an	Partisip atif													
Pandegl ang	Indeks Kemandi rian Keuanga n Daerah	8.02%	7.98%	8.99%	15.70%	8.34%	8.28%	7.74%	7.70%	9.23%	9.49%	11.27%	3.25 %	0.98 %	2.04 %
	Kemamp uan	Rendah Sekali													

	Keuangan														
	Pola Hubungan	Instruktif	Instruktif												
Lebak	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	13.61%	13.48%	12.20%	19.31%	13.95%	12.50%	14.82%	14.57%	15.91%	16.19%	12.18%	1.43 %	- 1.41 %	- 3.74 %
	Kemampuan Keuangan	Rendah Sekali													
	Pola Hubungan	Instruktif													
Daerah	Keterangan	Tahun												Kinerja	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun Terakhir	3 Tahun Awi	3 Tahun Akhir
Kab. Serang	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	23.08%	25.15%	23.94%	29.01%	23.88%	23.32%	24.53%	25.23%	26.13%	27.05%	29.33%	6.25 %	0.86 %	3.20 %
	Kemampuan Keuangan	Rendah Sekali	Rendah	Rendah Sekali	Rendah	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah	Rendah	Rendah			

	Pola Hubungan	Instruktif	Konsultatif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif			
Kab. Tangerang	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	42.62%	43.77%	42.81%	52.45%	52.39%	48,14	46.66%	46.67%	53.76%	55.16%	50.77%	8.14 %	0.19 %	-	2.99 %
	Kemampuan Keuangan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang				
	Pola Hubungan	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Partisipatif	Partisipatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Partisipatif	Partisipatif	Partisipatif				
Kota Tangerang	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	41.73%	43.55%	46.93%	50.68%	46.94%	47.39%	45.19%	44.37%	47.08%	48.42%	49.73%	8.00 %	5.20 %	2.65 %	
	Kemampuan Keuangan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah				
	Pola Hubungan	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Partisipatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif				
Tangerang Selatan	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	44.62%	47.20%	50.53%	54.06%	50.50%	52.77%	51.21%	48.18%	53.79%	52.38%	54.74%	10.12 %	5.91 %	0.96 %	

	Kemampuan Keuangan	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang		
	Pola Hubungan	Konsultatif	Konsultatif	Partisipatif	Partisipatif	Partisipatif	Partisipatif	Partisipatif	Konsultatif	Partisipatif	Partisipatif	Partisipatif	Partisipatif		
Kota Serang	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	9.55%	10.04%	11.21%	18.88%	13.22%	14.16%	14.24%	14.06%	18.57%	18.28%	18.91%	9.36 %	1.66 %	0.34 %
	Kemampuan Keuangan	Rendah Sekali													
	Pola Hubungan	Instruktif													
Daerah	Keterangan	Tahun												Kinerja	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun Terakhir	3 Tahun Awal	3 Tahun Akhir
Kota Cilegon	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	35.87%	37.31%	32.95%	38.16%	35.48%	35.93%	40.73%	35.33%	42.03%	40.02%	38.83%	2.95 %	- 2.92 %	- 3.20 %
	Kemampuan	Rendah													

	Keuangan													
	Pola Hubungan	Konsul tatif												

Sumber: Diolah

Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama dalam melihat sejauh mana suatu wilayah mampu mandiri secara fiskal. Provinsi Banten menunjukkan dinamika menarik dalam perjalanan fiskalnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pandemi COVID-19 yang menghantam sektor ekonomi, pemilu dan pilkada, serta penunjukan Penjabat Kepala Daerah (Pj) yang mempengaruhi kebijakan strategis di tingkat lokal. Secara umum, data analisis mengambil data sepuluh tahun, tiga tahun awal dan tiga tahun akhir, pengambilan sampel ini untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam mencapai indeks kemandirian, data 3 tahun awal digunakan sebagai pembanding dengan data 3 tahun terakhir untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau malah mengalami penurunan.

Hasil analisis menunjukkan, kemandirian keuangan daerah di Provinsi Banten melemah menjadi -0,05 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Selain itu kabupaten/kota di Banten masih menghadapi ketimpangan kemandirian fiskal yang signifikan. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan memiliki indeks kemandirian keuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah agraris seperti Pandeglang dan Lebak. Di sisi lain, pandemi COVID-19 menguji ketahanan fiskal di setiap daerah, dengan wilayah berbasis jasa seperti Kota Tangerang lebih cepat pulih dibandingkan wilayah agraris berdasarkan lini masa waktu.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

1. Tingkat Kemandirian yang Rendah

Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang terus menunjukkan ketergantungan besar pada transfer pusat. Sementara itu, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih baik.

2. Ketimpangan Fiskal:

Wilayah dengan perekonomian berbasis jasa dan industri (seperti Tangerang dan Tangerang Selatan) memiliki IKKD lebih tinggi dibandingkan wilayah agraris (Pandeglang dan Lebak).

3. Rekomendasi:

- Diversifikasi ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan seperti pariwisata berbasis alam dan budaya lokal.
- Peningkatan investasi infrastruktur untuk menarik investasi baru dan memperluas basis PAD.
- Penguatan kapasitas pemerintahan daerah melalui pelatihan dan kolaborasi lintas Kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika lokal di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Data dan Analisis Perbandingan

Provinsi Banten

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Menurun dari 69,31% (2014) menjadi 63,11% (2016).
- Kemampuan Keuangan: Stabil pada kategori Sedang dengan pola hubungan Partisipatif.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Fluktuatif, meningkat dari 62,56% (2021) menjadi 73,55% (2023).
- Kemampuan Keuangan: Tetap Sedang.

Kabupaten Pandeglang

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Rata-rata 8,33% (2014: 8,02%; 2016: 8,99%).
- Kemampuan Keuangan: Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 7,74% (2021) menjadi 9,49% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Tetap Rendah Sekali.

Kabupaten Lebak

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Menurun dari 13,61% (2014) menjadi 12,20% (2016).
- Kemampuan Keuangan: Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 14,57% (2021) menjadi 16,19% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Masih Rendah Sekali.

Kabupaten Serang

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Rata-rata 24,06% (2014: 23,08%; 2016: 23,94%).
- Kemampuan Keuangan: Fluktuasi antara Rendah Sekali dan Rendah.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 25,23% (2021) menjadi 27,05% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Rendah Sekali hingga Rendah.

Kota Serang

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Stabil di bawah 15%, rata-rata 10,93% (2014: 9,55%; 2016: 11,21%).
- Kemampuan Keuangan: Selalu Rendah Sekali.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 14,6% (2021) menjadi 18,28% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Tetap Rendah Sekali.

Kabupaten Tangerang

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Rata-rata 42,4% (2014: 42,62%; 2016: 42,81%).
- Kemampuan Keuangan: Rendah hingga Sedang.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 46,67% (2021) menjadi 55,16% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Rendah hingga Sedang.

Kota Tangerang

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Stabil di atas 41%, rata-rata 43,4% (2014: 41,73%; 2016: 46,93%).
- Kemampuan Keuangan: Rendah hingga Sedang.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 44,37% (2021) menjadi 48,42% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Tetap Rendah.

Kota Tangerang Selatan

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Stabil di atas 44%, rata-rata 47,45% (2014: 44,62%; 2016: 50,53%).
- Kemampuan Keuangan: Sedang dengan pola hubungan Partisipatif.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 48,18% (2021) menjadi 52,38% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Rendah hingga Sedang.

Kota Cilegon

Tiga Tahun Awal (2014-2016):

- IKKD: Rata-rata 35,37% (2014: 35,87%; 2016: 32,95%).
- Kemampuan Keuangan: Rendah dengan pola hubungan Konsultatif.

Tiga Tahun Akhir (2021-2023):

- IKKD: Naik dari 35,33% (2021) menjadi 40,02% (2023)
- Kemampuan Keuangan: Tetap Rendah.

III. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



III. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 Tahun Terakhir	3 Tahun Awal
Banten	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42	72.95	72.44	72.45	72.72	73.32	73.87	74.48	05.01	1.16	0.8
Pandeglang	61.35	62.06	62.72	63.4	63.82	64.34	64.91	65	65.17	65.84	66.42	66.99	5.64	1.15	1.37
Lebak	61.13	61.64	62.03	62.78	62.95	63.37	63.88	63.91	64.03	64.71	65.21	66.99	5.86	2.28	0.9
Kab. Serang	63.57	63.97	64.61	65.12	65.6	65.93	66.38	66.7	66.82	67.75	68.39	69.03	5.46	1.28	01.04
Kab. Tangerang	69.28	69.57	70.05	70.44	70.97	71.59	71.93	71.92	72.29	72.97	73.43	74.09	4.81	1.12	0.77

Kota Tangerang	75.04	75.87	76.08	76.81	77.01	77.92	78.43	78.25	78.5	78.9	79.46	80.02	4.98	1.12	01.04
Tangerang Selatan	78.65	79.17	79.38	80.11	80.84	81.17	81.48	81.36	81.6	81.95	82.28	82.89	4.24	0.94	0.73
Kota Serang	69.69	70.26	70.51	71.09	71.31	71.68	72.1	72.16	72.44	72.98	73.48	73.99	4.3	01.01	0.82
Kota Cilegon	70.99	71.57	71.81	72.04	72.29	72.65	73.01	73.05	73.35	73.95	74.54	75.14	4.15	1.19	0.82

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mencerminkan capaian pembangunan di tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, akses pendidikan, dan standar hidup yang layak. Di Provinsi Banten, kinerja IPM menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama satu dekade terakhir (2013-2024), dengan perbedaan signifikan antara kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, realisasi IPM Banten meningkat sebesar 5,01 poin dalam 10 tahun terakhir, dari 69,47 pada tahun 2013 menjadi 74,48 pada tahun 2024. Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam 10 tahun terakhir, dengan kenaikan masing-masing sebesar 4,24 dan 4,98 poin. Sementara itu, Kabupaten Lebak memperlihatkan tren kenaikan tertinggi sebesar 5,86 poin, diikuti oleh Kabupaten Pandeglang dengan kenaikan sebesar 5,64 poin.

Pada periode tiga tahun terakhir (2022-2024), Kota Tangerang Selatan tetap menunjukkan pertumbuhan, meskipun lebih lambat dibanding periode sebelumnya, dengan kenaikan sebesar 0,94 poin. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang juga mencatat peningkatan yang signifikan, masing-masing sebesar 2,28 dan 1,28 poin. Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada periode ini dengan kenaikan sebesar 1,15 poin, lebih rendah dibanding tiga tahun awal (2013-2015). Tren ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan infrastruktur antar wilayah, yang turut dipengaruhi oleh Indeks Kemandirian Daerah (IKD) masing-masing.

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian IPM, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Banyak wilayah mengalami stagnasi atau penurunan kecil dalam capaian IPM pada periode tersebut, yang baru mulai pulih pada tahun 2022 dan seterusnya. Namun, pemulihan ini bervariasi antar wilayah tergantung pada kapasitas fiskal dan infrastruktur yang dimiliki.

Indeks Kemandirian Daerah (IKD) juga menjadi faktor penting dalam capaian IPM. Kabupaten seperti Pandeglang dan Lebak dengan IKD rendah menghadapi keterbatasan dalam pendanaan program-program pembangunan manusia, yang tercermin dari pertumbuhan IPM selama tiga tahun terakhir. Pandeglang hanya mampu mencatat kenaikan IPM sebesar 1,15 poin, sedangkan Kabupaten Lebak dengan kenaikan 2,28 poin. Sementara itu, wilayah dengan IKD yang lebih tinggi, seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tidak hanya mampu mempertahankan tetapi juga meningkatkan IPM lebih konsisten, dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,12 poin dan 0,94 poin dalam tiga tahun terakhir. Tren ini menegaskan pentingnya kapasitas fiskal dalam mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kesimpulan

1. Ketimpangan IPM Antar Wilayah: Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang mencatat IPM tertinggi, sementara Kabupaten Pandeglang dan Lebak memiliki IPM terendah, mencerminkan kesenjangan dalam layanan publik dan infrastruktur.
2. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi menyebabkan stagnasi atau penurunan kecil dalam capaian IPM di tahun 2020, dengan pemulihan yang bervariasi antar wilayah.
3. Ketergantungan Fiskal: Kabupaten dengan IKD rendah menghadapi tantangan besar dalam mendanai program pembangunan manusia, yang memengaruhi capaian IPM.
4. Potensi Skema EFT: Implementasi EFT dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat peningkatan IPM, khususnya di wilayah seperti Pandeglang dan Lebak.

Rekomendasi

1. Implementasi Skema EFT:
 - o Memasukkan indikator ekologi dan capaian IPM dalam formula alokasi EFT untuk meningkatkan dana yang ditujukan ke wilayah dengan IPM rendah seperti Pandeglang dan Lebak.
2. Penguatan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan:
 - o Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah agraris dengan capaian IPM rendah.
3. Strategi Pemulihan Pasca-Pandemi:
 - o Mengutamakan program kesehatan masyarakat dan akses pendidikan untuk mempercepat pemulihan IPM di seluruh wilayah Banten.
4. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah:
 - o Mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan PAD di daerah dengan IKD rendah, mendukung program pembangunan manusia yang lebih mandiri.
5. Kolaborasi Antar Wilayah:
 - o Mengadopsi praktik terbaik dari wilayah dengan IPM tinggi seperti Kota Tangerang Selatan untuk diterapkan di daerah lain.

Data dan Analisis Perbandingan

Tabel 3
Kontribusi IPM di setiap Kabupaten dan Kota

Wilayah	Kontribusi Terbesar	Nilai Tren Kontribusi Terbesar (2013-2024)	Kontribusi Terendah	Nilai Tren Kontribusi Terendah (2013-2024)	Catatan
Provinsi Banten	Standar Hidup	5,01	Pendidikan	3,2	Pendapatan per kapita tinggi, terutama di wilayah perkotaan.
Kota Tangerang	Kesehatan	4,2	Pendidikan	2,5	Infrastruktur kesehatan mendorong umur harapan hidup yang baik.
Tangerang Selatan	Standar Hidup	4,14	Pendidikan	3,1	Pusat urbanisasi dan ekonomi meningkatkan standar hidup.
Kabupaten Pandeglang	Kesehatan	3,8	Standar Hidup	2,7	Akses kesehatan dasar meningkat, tetapi pendapatan masih rendah.
Kabupaten Lebak	Kesehatan	3,5	Standar Hidup	2,6	Perbaikan kesehatan ada, tetapi ekonomi masih menjadi tantangan.
Kota Cilegon	Standar Hidup	3,27	Pendidikan	2,4	Kota industri, pendapatan tinggi, tetapi pendidikan tertinggal.

Sumber: Diolah

Analisis tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten selama satu dekade (2013–2024) menunjukkan perbedaan kontribusi terbesar dan terendah pada masing-masing wilayah. Secara keseluruhan, Standar Hidup menjadi kontribusi terbesar di banyak wilayah, terutama di daerah dengan urbanisasi tinggi seperti Provinsi Banten (5,01) secara umum, Tangerang Selatan (4,14 Poin), dan Kota Cilegon (3,27 Poin). Tingginya pendapatan per kapita di wilayah ini menjadi pendorong utama peningkatan IPM. Namun, di Kota Tangerang, kontribusi terbesar datang dari Kesehatan, dengan nilai tren sebesar 4,20 poin, didorong oleh infrastruktur kesehatan yang memadai. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang (3,80 poin) dan Kabupaten Lebak (3,50 poin), di mana kesehatan memberikan kontribusi terbesar dengan nilai tren yang mencerminkan peningkatan akses layanan kesehatan dasar.

Sebaliknya, Pendidikan menjadi kontribusi terendah di sebagian besar wilayah, termasuk Provinsi Banten (3,2 poin), Kota Tangerang (2,5 poin), Tangerang Selatan (3,1 poin), dan Kota Cilegon (2,4 poin), dengan nilai tren yang relatif lebih rendah. Hal ini

menunjukkan perlunya peningkatan dalam Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, terutama di wilayah perkotaan dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sementara itu, di Kabupaten Pandeglang (2,7 poin) dan Kabupaten Lebak (2,6 poin), kontribusi terendah berasal dari Standar Hidup. Rendahnya pendapatan per kapita di wilayah pedesaan ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, analisis ini mengungkapkan bahwa wilayah dengan ekonomi perkotaan cenderung memiliki kontribusi lebih tinggi dari Standar Hidup, sedangkan wilayah pedesaan menghadapi kendala dalam ekonomi dan pendidikan. Perbedaan ini menjadi indikasi perlunya kebijakan yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan masing-masing wilayah untuk memastikan peningkatan IPM yang merata di Provinsi Banten. Berikut adalah hasil analisis perbandingan.

a. Provinsi Banten Satu Dekade Terakhir (2013-2024):

- IPM meningkat dari 69,47 (2013) menjadi 74,48 (2024), dengan kenaikan 5,01 poin.
- Periode 2022-2024 mencatat kenaikan 1,15 poin, sedangkan periode 2013-2015 hanya mencapai 0,8 poin, menunjukkan perlambatan tren di tahun-tahun awal .

b. Kota Tangerang Satu Dekade Terakhir (2013-2024):

- IPM meningkat 4,98 poin, dari 75,04 (2013) menjadi 80,02 (2024).
- Tiga tahun terakhir (2022-2024): IPM meningkat 1,12 poin, lebih cepat dibandingkan kenaikan 1,04 poin pada tiga tahun awal (2013-2015).

c. Tangerang Selatan Satu Dekade Terakhir (2013-2024):

- IPM meningkat 4,24 poin, dari 78,65 (2013) menjadi 82,89 (2024).
- Tiga tahun terakhir mencatat kenaikan 0,94 poin, lebih tinggi dibandingkan 0,73 poin pada tiga tahun awal.

d. Kabupaten Pandeglang Satu Dekade Terakhir (2013-2024):

- IPM meningkat hanya 5,64 poin, dari 61,35 (2013) menjadi 66,99 (2024).
- Tiga tahun terakhir: IPM naik 1,15 poin, lebih meningkat dibanding dengan kenaikan 1,37 poin pada tiga tahun awal, menunjukkan stagnasi tanpa akselerasi signifikan.

e. Kabupaten Lebak Satu Dekade Terakhir (2013-2024):

- IPM meningkat 5,86 poin, dari 61,13 (2013) menjadi 66,99 (2024).
- Tiga tahun terakhir: Kenaikan hanya 2,28 poin, lebih meningkat dibandingkan kenaikan 0,9 poin pada tiga tahun awal.

f. Kota Cilegon Satu Dekade Terakhir (2013-2024):

- IPM meningkat 4,15 poin, dari 70,99 (2013) menjadi 75,14 (2024).
- Tiga tahun terakhir mencatat kenaikan 1,19 poin, lebih tinggi dibandingkan 0,82 poin pada tiga tahun awal.

Catatan kritis ini menunjukkan bahwa tren kenaikan IPM di Banten cenderung lambat dalam tiga tahun terakhir, mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan pembangunan di setiap wilayah. Pengaruh pandemi dan ketimpangan fiskal harus menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan peningkatan IPM di masa depan.

Tren kenaikan dan penurunan IPM dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting untuk mengevaluasi capaian pendidikan di suatu wilayah. Selain itu, Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi aspek penting yang memberikan kontribusi besar terhadap nilai IPM, karena mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Di Provinsi Banten, tren RLS HLS, dan AHH selama satu dekade terakhir (2013-2024) menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota, mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan, serta kesehatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih adil, analisis ini tidak hanya berfokus pada perbandingan absolut antarwilayah tetapi juga mengevaluasi kinerja pemerintah dari sisi peningkatan RLS, HLS, dan AHH selama 10 tahun terakhir dan tiga tahun terakhir (2022-2024). Kombinasi dari peningkatan di sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Rata rata Lama Sekolah

Tabel 4
Rata Rata Lama Sekolah

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 tahun awal	3 tahun akhir
Banten	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53	8,62	8,74	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23	1,06	0,1	0,1
Pandeglang	6,44	6,45	6,6	6,62	6,63	6,72	6,96	7,1	7,11	7,13	7,15	7,16	0,72	0,16	0,03
Lebak	5,81	5,84	5,86	6,19	6,2	6,21	6,31	6,4	6,41	6,59	6,6	6,61	0,8	0,05	0,02
Kab. Serang	6,65	6,69	6,9	6,98	7,17	7,18	7,33	7,5	7,51	7,78	7,79	7,88	1,23	0,25	0,1
Kab. Tanggerang	8,18	8,2	8,22	8,23	8,24	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92	8,93	9,06	0,88	0,04	0,14
Kota Tanggerang	9,82	10,2	10,2	10,28	10,29	10,51	10,65	10,69	10,83	10,84	10,91	11,14	1,32	0,38	0,3
Tangerang Selatan	11,48	11,56	11,57	11,58	11,77	11,78	11,8	11,81	11,82	11,84	11,85	11,86	0,38	0,09	0,02
Kota Serang	8,56	8,58	8,59	8,6	8,61	8,62	8,67	8,76	8,89	8,9	8,91	8,93	0,37	0,03	0,03
Kota Cilegon	9,6	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73	9,74	9,87	10,08	10,34	10,38	10,39	0,79	0,07	0,05

Sumber: BPS

Secara keseluruhan, RLS Provinsi Banten meningkat sebesar 1,06 tahun dalam 10 tahun terakhir, dari 8,17 tahun pada 2013 menjadi 9,23 tahun pada 2024. Kota Tangerang mencatat kinerja terbaik, dengan peningkatan signifikan dari 9,82 tahun pada 2013 menjadi 11,14 tahun pada 2024. Sementara itu, Kabupaten Lebak berada di peringkat tengah dengan peningkatan dari 5,81 tahun menjadi 6,61 tahun pada periode yang sama. Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang menunjukkan kenaikan yang lebih kecil dibandingkan Lebak, dari 6,44 tahun pada 2013 menjadi 7,16 tahun pada 2024. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terarah untuk mempercepat peningkatan di wilayah rural seperti Pandeglang, yang masih tertinggal dalam capaian pendidikan dibandingkan wilayah lainnya.

Harapan Lama Sekolah

Tabel 5
Harapan Lama Sekolah

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 tahun awal	3 tahun akhir
Banten	12,05	12,31	12,35	12,7	12,78	12,85	12,88	12,89	13,02	13,05	13,09	13,1	1,05	0,3	0,05
Pandeglang	12,86	13,38	13,39	13,4	13,41	13,42	13,46	13,47	13,49	13,72	13,73	13,74	0,88	0,53	0,02
Lebak	11,55	11,88	11,9	11,91	11,92	11,93	11,96	11,97	11,98	12,09	12,1	12,11	0,56	0,35	0,02
Kab. Serang	12,09	12,35	12,36	12,37	12,38	12,39	12,43	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87	0,78	0,27	0,09
Kab. Tangerang	11,44	11,65	11,89	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85	12,87	12,88	1,44	0,45	0,03
Kota Tangerang	12,6	12,86	12,9	13,41	13,44	13,83	13,84	13,85	13,87	13,88	13,89	13,9	1,3	0,3	0,02

Tangerang Selatan	13,24	13,58	13,61	14,08	14,39	14,42	14,43	14,47	14,66	14,67	14,68	14,7	1,46	0,37	0,03
Kota Serang	11,92	12,34	12,36	12,63	12,64	12,65	12,77	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83	0,91	0,44	0,02
Kota Cilegon	12,67	13,07	13,1	13,11	13,12	13,13	13,15	13,16	13,18	13,2	13,21	13,23	0,56	0,43	0,03

Sumber: BPS

HLS Provinsi Banten juga menunjukkan tren positif, meningkat sebesar 1,05 tahun dalam satu dekade terakhir, dari 12,05 tahun pada 2013 menjadi 13,1 tahun pada 2024. Kota Tangerang Selatan kembali mencatat HLS tertinggi, dari 13,24 tahun menjadi 14,7 tahun, sementara Kabupaten Lebak tertinggal dengan peningkatan yang lebih kecil, dari 11,55 tahun menjadi 12,11 tahun. Perbedaan ini mengindikasikan perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di wilayah dengan capaian lebih rendah.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada sektor pendidikan, memperlambat laju peningkatan RLS dan HLS di sebagian besar wilayah. Namun, program pendidikan berbasis digital dan dukungan infrastruktur di wilayah urban membantu menjaga tren positif di wilayah seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sebaliknya, wilayah rural seperti Pandeglang dan Lebak menghadapi tantangan lebih besar dalam menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh akibat keterbatasan akses internet dan infrastruktur.

Karakteristik masing-masing wilayah juga mempengaruhi pola pertumbuhan RLS dan HLS. Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang menunjukkan stabilitas yang tinggi karena dukungan infrastruktur pendidikan yang mapan, sementara Kabupaten Lebak dan Pandeglang membutuhkan pendekatan yang lebih intensif untuk mempercepat laju peningkatan.

Dengan demikian, diperlukan strategi terpadu yang mengintegrasikan peningkatan akses pendidikan, penguatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Kesimpulan

1. Peningkatan Keseluruhan yang Positif: Provinsi Banten mencatat peningkatan RLS sebesar 1,06 tahun dan HLS sebesar 1,46 tahun selama satu dekade terakhir. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pendidikan di tingkat provinsi.
2. Ketimpangan Antar Wilayah: Kota Tangerang menunjukkan kinerja terbaik dalam peningkatan RLS, sementara Kabupaten Pandeglang mencatat peningkatan yang lebih kecil dibandingkan wilayah lain, menyoroti tantangan akses pendidikan di wilayah rural.
3. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi memperlambat laju peningkatan RLS dan HLS di seluruh wilayah, terutama di wilayah rural seperti Pandeglang dan Lebak, akibat keterbatasan infrastruktur digital.
4. Kinerja Kota dan Kabupaten: Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang menunjukkan stabilitas tinggi dalam capaian pendidikan, sedangkan Kabupaten Lebak berada di peringkat tengah dengan peningkatan yang moderat.
5. Perlunya Strategi Terpadu: Untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan strategi yang mengintegrasikan penguatan infrastruktur pendidikan, akses internet di wilayah rural, dan program pengembangan sumber daya manusia berbasis lokal.

Rekomendasi

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan:
 - Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
 - Memperkuat akses transportasi untuk meningkatkan keterjangkauan sekolah.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan:
 - Pelatihan untuk guru di wilayah dengan kualitas pendidikan rendah.
 - Penyediaan fasilitas belajar yang memadai, termasuk teknologi pendidikan.
3. Program Insentif:
 - Memberikan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.
 - Memberikan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil.

Data dan Analisis Perbandingan

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (2013-2024):

Provinsi banten

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 8,17 tahun ke 9,23 tahun (+1,06 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 12,05 tahun ke 13,01 tahun (+1,05 tahun).

Pandeglang

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 6,44 tahun ke 7,16 tahun (+0,72 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 12,86 tahun ke 13,74 tahun (+0,88 tahun).

Lebak

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 5,81 tahun ke 6,61 tahun (+0,80 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 11,55 tahun ke 12,11 tahun (+0,56 tahun).

Kab. Serang

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 6,65 tahun ke 7,88 tahun (+1,23 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 12,09 tahun ke 12,87 tahun (+0,78 tahun).

Kab. Tangerang

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 8,18 tahun ke 9,06 tahun (+0,88 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 11,44 tahun ke 12,88 tahun (+1,44 tahun).

Kota Serang

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 8,56 tahun ke 8,93 tahun (+0,37 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 11,92 tahun ke 12,83 tahun (+0,91 tahun).

•

Kota Cilegon

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 9,6 tahun ke 10,39 tahun (+0,79 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 12,67 tahun ke 13,23 tahun (+0,56 tahun).

Kota Tangerang

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 9,82 tahun ke 11,14 tahun (+1,32 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 12,6 tahun ke 13,9 tahun (+1,3 tahun).

Kota Tangerang Selatan

- Rata-rata Lama Sekolah: Naik dari 11,48 tahun ke 11,86 tahun (+0,38 tahun).
- Harapan Lama Sekolah: Naik dari 13,24 tahun ke 14,70 tahun (+1,46 tahun).

Angka Harapan Hidup

Tabel 6
Angka Harapan Hidup

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 tahun awal	3 tahun akhir
Banten	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49	69,64	69,84	69,96	70,02	70,39	70,77	74,97	5,93	0,39	4,58
Pandeglang	62,83	62,91	63,51	63,77	64,04	64,24	64,49	65	73,22	73,63	74,01	74,22	11,39	0,68	0,59
Lebak	65,83	65,88	66,28	66,43	66,59	66,79	67,04	67,21	67,33	67,74	68,13	73,99	8,16	0,45	6,25
Kab. Serang	63,03	63,09	63,59	63,81	64,02	64,22	64,47	66,7	66,82	67,75	68,39	74,91	11,88	0,56	7,16
Kab. Tangerang	68,96	68,98	69,28	69,37	69,47	69,61	69,79	71,92	72,29	72,97	73,43	75,34	6,38	0,32	2,37
Kota Tangerang	71,09	71,09	71,29	71,34	71,38	71,45	71,57	71,6	78,5	78,9	79,46	75,5	4,41	0,2	-3,4
Tangerang Selatan	72,1	72,11	72,12	72,14	72,16	72,26	72,41	72,47	81,60	81,95	82,28	75,8	3,7	0,02	-6,15
Kota Serang	67,23	67,23	67,33	67,36	67,38	67,58	67,83	68	68,12	68,54	68,98	75,31	8,08	0,1	6,77
Kota Cilegon	65,84	65,85	66,15	66,24	66,32	66,43	66,6	73,05	73,35	73,95	74,54	75,03	9,19	0,31	1,08

Sumber: BPS

Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Banten mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat selama satu dekade terakhir (2013-2024). Berdasarkan data, rata-rata AHH di Provinsi Banten meningkat dari 69,04 tahun pada tahun 2013 menjadi 74,97 tahun pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sebesar 5,93 tahun. Perubahan ini mengindikasikan keberhasilan dalam berbagai program kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat variasi di antara kabupaten dan kota.

Peningkatan AHH di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling mendukung, seperti:

1. Akses dan kualitas layanan kesehatan meningkat termasuk program jaminan kesehatan, penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dari mulai peningkatan pengelolaan sampah, dan kualitas udara
3. kebijakan pemerintah yang mendukung akses dan kualitas layanan kesehatan
4. Peningkatan pendidikan kesehatan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat

Kebijakan dan Tantangan

Meskipun terjadi peningkatan signifikan, beberapa tantangan masih perlu diatasi:

1. Ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah rural seperti Pandeglang dan Lebak.
2. Perlunya penguatan edukasi kesehatan untuk menekan angka penyakit kronis.
3. Pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai untuk populasi yang terus bertambah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Peningkatan AHH Secara Umum: Rata-rata AHH di Provinsi Banten meningkat sebesar 7,69 tahun selama satu dekade terakhir, mencerminkan keberhasilan program pembangunan di sektor kesehatan.
2. Ketimpangan Antar Wilayah: Kabupaten seperti Pandeglang dan Lebak mencatat peningkatan signifikan, tetapi masih memerlukan perhatian khusus dalam akses layanan kesehatan.

Rekomendasi

- Memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, dengan meningkatkan jumlah puskesmas, klinik serta penyedia layanan kesehatan lainnya
- Meningkatkan Program Penyuluhan Kesehatan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pola gizi yang seimbang terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan lansia, serta meningkatkan penyuluhan yang lebih luas mengenai penyakit tidak menular
- Perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan meningkatkan sanitasi untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Data dan Analisis Perbandingan

1. Provinsi Banten

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 69,04 tahun menjadi 74,97 tahun.
- Peningkatan sebesar 5,93 tahun, mencerminkan tren yang positif secara keseluruhan.

2. Kabupaten Pandeglang

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 62,83 tahun menjadi 74,22 tahun.
- Peningkatan sebesar 11,39 tahun, menunjukkan perbaikan signifikan dalam akses kesehatan.

3. Kabupaten Lebak

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 65,83 tahun menjadi 73,99 tahun.
- Peningkatan sebesar 8,16 tahun, mencerminkan tren positif.

4. Kabupaten Serang

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 63,03 tahun menjadi 74,91 tahun.
- Peningkatan sebesar 11,88 tahun, menunjukkan keberhasilan program kesehatan lokal.

5. Kabupaten Tangerang

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 68,96 tahun menjadi 75,34 tahun.
- Peningkatan sebesar 6,38 tahun, mencerminkan stabilitas dan kemajuan kesehatan.

6. Kota Tangerang

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 71,09 tahun menjadi 75,50 tahun.
- Peningkatan sebesar 4,41 tahun, menunjukkan tren yang konsisten.

7. Kota Tangerang Selatan

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 72,10 tahun menjadi 75,80 tahun.
- Peningkatan sebesar 3,7 tahun, mencerminkan stabilitas tinggi di wilayah urban.

8. Kota Serang

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 67,23 tahun menjadi 75,31 tahun.
- Peningkatan sebesar 8,08 tahun, menunjukkan keberhasilan program di wilayah urban.

9. Kota Cilegon

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): AHH meningkat dari 65,84 tahun menjadi 75,03 tahun.
- Peningkatan sebesar 9,19 tahun, mencerminkan kemajuan signifikan.

IV. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



IV. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 tahun awal	3 tahun akhir
Banten	7.13	5.47	5.4	5.26	5.75	5.77	5.26	-3.39	4.49	5.03	4.81	4.93	-2.2	-0.1	-1.73
Pandeglang	4.72	4,93	5,81	5,52	6,05	5,30	4,75	-0,54	3.1	3.47	2.53	7.91	3.19	4.44	1,09
Lebak	6.3	5,83	6,20	5,87	6,05	5.63	5.55	-0.88	3.18	3.8	2.8	5.53	-0.77	1.73	-0.37
Kab. Serang	6.04	5.99	5.14	5,10	5,21	5.33	5.08	-1.96	3.74	5.04	4.8	5.08	-0.96	0.04	-0.9
Kab. Tangerang	6.41	5.76	5.39	5,36	5,84	5,80	5,58	-3,7	4.7	5.47	5.18	4.45	-1.96	-1.02	-1.02
Kota Tangerang	6.52	5.64	5.58	5.3	5.91	4.95	4.05	-6.92	4.95	4.05	-6.92	5.08	-1.44	1.03	-0.94
Tangerang Selatan	8,75	8,05	7,25	6.74	7.3	7.49	7.4	-1.01	4.77	5.82	5.32	5.65	-3.1	-0.17	-1,5
Kota Serang	7.3	7.07	6.43	6,28	6,41	6.46	6.44	-1.29	3.88	4.71	4.74	5.19	-2.11	0.48	-0.87
Kota Cilegon	6.69	4.93	4.81	5,05	5,59	6.11	5.32	-0.88	5.24	4.51	4.82	4.03	-2.66	-0.48	-1.88

Sumber: BPS

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat ekspansi ekonomi suatu wilayah. Di Provinsi Banten, tren LPE selama satu dekade terakhir (2013-2024) menunjukkan variasi yang signifikan antara kabupaten/kota. Selain itu, karakteristik ekonomi dan produk unggulan di setiap wilayah juga berperan penting dalam menentukan pola pertumbuhan.

Wilayah urban seperti Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, didukung oleh sektor jasa dan perdagangan. Sebaliknya, wilayah agraris seperti Pandeglang dan Lebak menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan LPE, meskipun memiliki potensi di sektor primer seperti pertanian dan perikanan. Tren ini juga mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang memberikan pukulan besar pada tahun 2020, dengan kontraksi ekonomi di hampir semua wilayah.

Implementasi skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banten. Dengan memasukkan indikator keberlanjutan ke dalam formula alokasi fiskal, EFT dapat memberikan insentif kepada wilayah untuk memanfaatkan potensi unggulannya secara optimal.

Kesimpulan

1. Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi: Kota Tangerang Selatan mencatat pertumbuhan paling stabil selama 10 tahun terakhir, dengan tingkat LPE mencapai 5,65% pada 2024. Sebaliknya, Kota Cilegon mengalami kontraksi terbesar sebesar -2,66% dalam periode yang sama, mencerminkan tantangan dalam sektor industriya.
2. Peran Produk Unggulan: Wilayah urban seperti Kota Tangerang Selatan didukung oleh sektor jasa dan perdagangan yang mapan, sementara Pandeglang dan Lebak memiliki potensi di sektor pertanian yang belum tergarap secara maksimal.
3. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi mengakibatkan kontraksi ekonomi besar di tahun 2020, dengan Kota Tangerang mengalami penurunan hingga -6,92%.
4. Wilayah Agraris dan Urban: Wilayah agraris seperti Pandeglang menunjukkan pertumbuhan signifikan pada periode 3 tahun terakhir (+4,44%), sedangkan wilayah urban seperti Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi akibat ketergantungan pada sektor tertentu.

5. Potensi Skema EFT: Implementasi EFT dapat mendukung pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan, memberikan insentif untuk wilayah agraris dan urban dalam memanfaatkan produk unggulan mereka.

Rekomendasi

1. Diversifikasi Ekonomi di Wilayah Agraris:

Meningkatkan kapasitas sektor sekunder di wilayah seperti Pandeglang dan Lebak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

2. Penguatan Infrastruktur Ekonomi:

Mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur pendukung ekonomi di wilayah dengan LPE rendah.

3. Implementasi Skema EFT:

Memasukkan indikator keberlanjutan ke dalam formula EFT untuk memberikan insentif fiskal kepada wilayah yang mampu mengoptimalkan produk unggulannya.

4. Pemulihan Pasca-Pandemi:

Mendukung UMKM dan sektor ekonomi lokal di wilayah terdampak pandemi, seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

5. Peningkatan Kapasitas SDM:

Meluncurkan program pelatihan berbasis kebutuhan lokal untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di semua wilayah.

Data dan Analisis Perbandingan

Data Tren Ekonomi 10 Tahun Terakhir (2013-2024):

- Provinsi Banten: Menurun dari 7,13% ke 4,93% (-2,20%).
- Kabupaten Pandeglang: Naik dari 4,72% ke 7,91% (+3,19%).
- Kabupaten Lebak: Menurun dari 6,30% ke 5,53% (-0,77%).
- Kabupaten Serang: Menurun dari 6,04% ke 5,08% (-0,96%).
- Kabupaten Tangerang: Menurun dari 6,41% ke 4,45% (-1,96%).
- Kota Tangerang: Menurun dari 6,52% ke 5,08% (-1,44%).
- Kota Tangerang Selatan: Menurun dari 8,75% ke 5,65% (-3,10%).
- Kota Serang: Menurun dari 7,30% ke 5,19% (-2,11%).
- Kota Cilegon: Menurun dari 6,69% ke 4,03% (-2,66%).

Data Tren Ekonomi 3 Tahun Awal (2013-2015) dan Akhir (2022-2024):

- Provinsi Banten: -1,73% (2013-2015), -0,10% (2022-2024).
- Kabupaten Pandeglang: +6,72% (2013-2015), +4,44% (2022-2024).
- Kabupaten Lebak: -0,37% (2013-2015), +1,73% (2022-2024).
- Kabupaten Serang: -0,90% (2013-2015), +0,04% (2022-2024).
- Kabupaten Tangerang: -1,02% (2013-2015), -1,02% (2022-2024).
- Kota Tangerang: -0,94% (2013-2015), +1,03% (2022-2024).
- Kota Tangerang Selatan: -8,6% (2013-2015), -0,17% (2022-2024).
- Kota Serang: -0,87% (2013-2015), +0,48% (2022-2024).
- Kota Cilegon: -1,88% (2013-2015), -0,48% (2022-2024).

Catatan ini menekankan perlunya reformasi dan strategi baru untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di Provinsi Banten. Ketimpangan fiskal dan struktur ekonomi yang tidak seimbang harus menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negatif pada masa depan.

V. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)



V. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 tahun awal	3 tahun akhir
Banten	9,9	9,07	9,55	8,92	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68	-3,22	-0,35	-1,41
Pandeglang	12,34	7,03	10,22	9,55	8,3	8,19	8,67	9,15	7,7	9,24	9,05	8,09	-4,25	-2,12	-1,15
Lebak	7,23	9,57	10,74	10,04	8,88	7,57	7,96	9,63	7,86	8,55	7,57	6,23	-1	3,51	-2,32
Kab. Serang	13,69	14,76	14,8	13,83	13	12,63	10,58	12,22	10,58	10,61	9,94	9,18	-4,51	1,11	-1,43
Kab. Tangerang	11,94	8,45	9	8,42	10,57	9,63	8,92	13,06	9,06	7,88	6,94	6,06	-5,88	-2,94	-1,82
Kota Tangerang	8,62	7,81	8	7,48	7,16	7,39	7,14	8,63	9,07	7,16	6,76	5,92	-2,7	-0,62	-1,24
Tangerang Selatan	4,56	6,92	6,13	5,73	6,83	4,67	4,78	8,48	8,6	6,59	5,81	5,09	0,53	1,57	-1,5
Kota Serang	11,29	10,03	9,49	8,87	8,43	8,1	8,07	9,26	9,41	8,17	7,45	7,12	-4,17	-1,8	-1,05
Kota Cilegon	7,16	11,83	12	11,22	11,88	9,21	9,64	12,69	10,13	8,1	7,25	6,08	-1,08	4,84	-2,02

Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator kunci yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap angkatan kerja. Di Provinsi Banten, TPT menunjukkan variasi signifikan antara kabupaten/kota selama satu dekade terakhir (2014-2024). Data menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan rata-rata TPT di seluruh wilayah, beberapa daerah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi pengangguran, terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 11,58% pada 2024.

Secara keseluruhan, TPT Provinsi Banten menurun dari 9,9% pada tahun 2014 menjadi 6,68% pada tahun 2024, menunjukkan penurunan sebesar -3,22% dalam 10 tahun terakhir. Kabupaten Tangerang mencatat penurunan terbesar sebesar -5,0%, dari 11,94% pada 2013 menjadi 6,94% pada 2023. Sebaliknya, Kabupaten Serang mencatat penurunan lebih lambat, dari 13,69% pada 2013 menjadi 9,94% pada 2023. Tren ini mencerminkan perbedaan kapasitas wilayah dalam menciptakan lapangan kerja.

Pada tahun 2013, Provinsi Banten berada di peringkat ke-3 nasional dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), naik menjadi peringkat ke-2 pada 2014, dan kembali ke peringkat ke-3 pada 2015. Namun, selama dekade terakhir, posisi ini tidak mencerminkan perbaikan. Peringkat ke-1 pada tahun 2023 justru menegaskan bahwa Banten menghadapi tantangan serius dalam mengurangi pengangguran, di mana tingginya tingkat pengangguran menjadi sinyal kurang efektifnya strategi pasar kerja. Penurunan ke peringkat ke-2 pada 2024 tetap memperlihatkan posisi yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih perlu meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan kapasitas wilayah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Tantangan lainnya mencakup ketergantungan pada sektor ekonomi yang belum terdiversifikasi di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang mempengaruhi kapasitas wilayah untuk menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada TPT di seluruh wilayah Banten, dengan peningkatan tajam di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2020. Namun, tingkat pemulihan bervariasi antarwilayah, tergantung pada struktur ekonomi dan infrastruktur pasar kerja masing-masing.

Indeks Kemandirian Keuangan Daerah (IKKD) dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memainkan peran penting dalam tren pengurangan TPT. Kabupaten dengan IKKD dan IPM rendah seperti Pandeglang dan Lebak mencatat tantangan besar dalam menurunkan TPT meskipun terdapat sedikit perbaikan. Sebaliknya, wilayah dengan capaian IPM dan IKKD lebih tinggi seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Kesimpulan

1. Ketimpangan TPT Antar Wilayah: Kabupaten Tangerang mencatat penurunan TPT terbesar selama 10 tahun terakhir (-5,0%), mencerminkan keberhasilan dalam diversifikasi ekonomi. Sebaliknya, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon menghadapi tantangan besar, dengan penurunan TPT yang lambat dan bahkan stagnasi di beberapa tahun terakhir.
2. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi menyebabkan lonjakan TPT di hampir semua wilayah pada tahun 2020. Tingkat pemulihan yang tidak merata mengungkapkan kelemahan struktur ekonomi di wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
3. Kesenjangan Struktural: Tingginya pengangguran lulusan SMK (11,58% pada 2024) menyoroti kurangnya koneksi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, memperparah kesenjangan di pasar tenaga kerja.
4. Peran IKKD dan IPM: Kabupaten dengan IKKD dan IPM rendah, seperti Pandeglang dan Lebak, menunjukkan kapasitas terbatas dalam menurunkan TPT, berbeda dengan wilayah seperti Kota Tangerang Selatan yang lebih mandiri secara fiskal dan unggul dalam IPM.

Rekomendasi

1. Pengembangan Program Pelatihan:
 - Merancang program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal, khususnya untuk lulusan SMK, guna menjembatani kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar.
2. Diversifikasi Ekonomi Wilayah Agraris:
 - Mendorong investasi pada sektor ekonomi baru di wilayah agraris seperti Lebak dan Pandeglang untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
3. Penguatan Infrastruktur Pasar Kerja:
 - Membuka lebih banyak pusat layanan kerja dan akses digital untuk mendukung penyerapan tenaga kerja di wilayah dengan TPT tinggi.
4. Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri:
 - Memperkuat sinergi antara institusi pendidikan, terutama SMK, dengan dunia industri untuk memastikan kurikulum selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Mengefektifkan anggaran untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru, mengundang investasi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Data dan Analisis Perbandingan

- **Tren TPT 10 Tahun Terakhir (2013-2024) :**
 - Banten: Menurun dari 9,9% ke 6,68% (-3,22%).
 - Pandeglang: Menurun dari 12,34% ke 8,09% (-4,25%).
 - Lebak: Menurun dari 7,23% ke 6,23% (-1%).
 - Kabupaten Serang: Menurun dari 13,69% ke 9,18% (-4,51%).
 - Kabupaten Tangerang: Menurun dari 11,94% ke 6,06% (-5,88%).
 - Kota Serang: Menurun dari 11,29% ke 7,12% (-4,17%).
 - Kota Cilegon: Menurun dari 7,16% ke 6,08% (-1,08%).
 - Kota Tangerang: Menurun dari 8,62% ke 5,92% (-2,7%).
 - Kota Tangerang Selatan: Naik dari 4,56% ke 5,09% (+0,53%).
- **Tren 3 Tahun Awal dan Akhir:**
 - Banten: Menurun -0,35% (2013-2015) dan -1,41% (2022-2024).
 - Pandeglang: Menurun -2,12% (2013-2015) dan Menurun -1,15% (2021-2024).
 - Lebak: Naik 3,51% (2013-2015) dan menurun -2,32% (2022-2024).

- Kabupaten Serang: Naik 1,11% (2013-2015) dan Menurun -1,43% (2021-2024).
- Kabupaten Tangerang: Menurun -2,94% (2013-2015) dan Menurun -1,82% (2021-2024).
- Kota Serang: Menurun -1,8% (2013-2015) dan Menurun -1,05% (2021-2024).
- Kota Cilegon: Naik 4,84% (2013-2015) dan menurun -2,02% (2021-2024).
- Kota Tangerang: Menurun -0,62% (2013-2015) dan Menurun -1,24% (2021-2024).
- Kota Tangerang Selatan: Naik 1,57% (2013-2015) dan Menurun -1,5% (2021-2024).

Catatan ini menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran struktural di Provinsi Banten. Ketimpangan antar wilayah, dampak pandemi, dan lemahnya diversifikasi ekonomi harus segera ditangani untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif.

VI. TINGKAT KEMISKINAN



VI. Tingkat Kemiskinan

Tabel 9
Tingkat Kemiskinan

Daerah	Tahun												Kinerja		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Tahun	3 tahun awal	3 tahun akhir
Banten	7.13	5.74	5.4	5.36	5.75	5.77	5.26	-3.39	4.49	5.03	4.81	4.93	-2.2	-0.1	-1.73
Pandeglang	4.72	10.6	11.44	9,67	9,74	9,61	9,42	9,92	3.1	3.47	2.53	7.91	3.19	4.44	6.72
Lebak	6.3	6.04	5.93	8,71	8,64	5.63	5.55	-0.88	3.18	3.8	2.8	5.53	-0.77	1.73	-0.37
Kab. Serang	6.04	5.99	5.14	4,58	4,63	5.33	5.08	-1.96	3.74	5.04	4.8	5.08	-0.96	0.04	-0.9
Kab. Tangerang	6.41	5.76	5.39	5,29	5,39	5,18	5,14	6,23	4.7	5.47	5.18	4.45	-1.96	-1.02	-1.02
Kota Tangerang	6.52	5.64	5.58	5.3	5.91	4.95	4.05	-6.92	4.95	4.05	-6.92	5.08	-1.44	1.03	-0.94
Tangerang Selatan	8.75	0.085	0.0725	6.74	7.3	7.49	7.4	-1.01	4.77	5.82	5.32	5.65	-3.1	-0.17	-8.6775

Kota Serang	7.3	7.07	6.43	5,58	5,57	6.46	6.44	-1.29	3.88	4.71	4.74	5.19	-2.11	0.48	-0.87
Kota Cilegon	6.69	4.93	4.81	3,57	3,52	6.11	5.32	-0.88	5.24	4.51	4.82	4.03	-2.66	-0.48	-1.88

Sumber: BPS

Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data terbaru (2013-2024), rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurun dari 7,13% pada tahun 2013 menjadi 4,93% pada tahun 2024, menunjukkan penurunan sebesar -2,2%. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya positif dalam pengentasan kemiskinan, meskipun beberapa wilayah mencatat tren yang berbeda.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Ketergantungan pada sektor agraris di wilayah seperti Pandeglang dan Lebak menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Minimnya diversifikasi ekonomi di daerah-daerah agraris membatasi peluang kerja di sektor non-agraris. Akses pendidikan yang rendah dan keterbatasan layanan kesehatan menurunkan kualitas hidup masyarakat miskin. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di daerah terpencil berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan besar pada transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanpa strategi keberlanjutan lokal menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan. Program pengentasan sering kali tidak terintegrasi. Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi dengan meningkatkan jumlah masyarakat rentan miskin akibat kehilangan pekerjaan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas berdampak pada pendapatan petani.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Penurunan Kemiskinan Secara Umum: Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurun sebesar -2,2% dalam satu dekade terakhir, namun disparitas antar wilayah tetap menjadi perhatian utama.
2. Ketimpangan Antar Wilayah: Wilayah agraris seperti Pandeglang dan Lebak menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan wilayah urban seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Rekomendasi

- Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya di wilayah agraris. Meningkatkan investasi di sektor non-agraris, seperti manufaktur ringan dan UMKM.
- Infrastruktur dan Aksesibilitas: Meningkatkan akses ke infrastruktur dasar di daerah terpencil. Menghubungkan wilayah agraris dengan pusat ekonomi melalui pembangunan koneksi jalan dan transportasi.
- Penguatan Program Sosial: Memperluas cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan langsung tunai. Memperkuat sistem perlindungan sosial untuk masyarakat rentan miskin.
- Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan: Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk mengatasi akar kemiskinan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

3. Penurunan Kemiskinan Secara Umum: Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurun sebesar -2,2% dalam satu dekade terakhir, namun disparitas antar wilayah tetap menjadi perhatian utama.
4. Ketimpangan Antar Wilayah: Wilayah agraris seperti Pandeglang dan Lebak menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan wilayah urban seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Rekomendasi

- Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya di wilayah agraris. Meningkatkan investasi di sektor non-agraris, seperti manufaktur ringan dan UMKM.

- Infrastruktur dan Aksesibilitas: Meningkatkan akses ke infrastruktur dasar di daerah terpencil. Menghubungkan wilayah agraris dengan pusat ekonomi melalui pembangunan koneksi jalan dan transportasi.
- Penguatan Program Sosial: Memperluas cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan langsung tunai. Memperkuat sistem perlindungan sosial untuk masyarakat rentan miskin.
- Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan: Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk mengatasi akar kemiskinan.

Data dan Analisis Perbandingan

1. Provinsi Banten
 - Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 7,13% menjadi 4,93%.
 - Penurunan sebesar -2,2%, mencerminkan ketebalan tingkat provinsi.
2. Kabupaten Pandeglang
 - Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan naik dari 4,72% menjadi 7,91%.
 - Kenaikan sebesar 3,19%, menunjukkan perlunya perbaikan yang signifikan.
3. Kabupaten Lebak
 - Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 6,3% menjadi 5,53%.
 - Penurunan sebesar -0,77%, mencerminkan tren positif.
4. Kabupaten Tangerang
 - Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 6,41% menjadi 4,45%.
 - Penurunan sebesar -1,96%, mengindikasikan perhatian yang lebih baik pada diversifikasi ekonomi.
5. Kabupaten Serang
 - Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 6,04% menjadi 5,08%.
 - Penurunan sebesar -0,96%, mencerminkan perbaikan yang moderat.
6. Kota Tangerang
 - Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 6,52% menjadi 5,08%.
 - Penurunan sebesar -1,44%, menunjukkan stabilitas yang relatif baik.
7. Kota Cilegon

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 6,69% menjadi 4,03%.
- Penurunan sebesar -2,66%, mencerminkan kestabilan.

8. Kota Serang

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 7,3% menjadi 5,19%.
- Penurunan sebesar -2,11%, mencerminkan perbaikan kecil.

9. Kota Tangerang Selatan

- Satu Dekade Terakhir (2013-2024): Tingkat kemiskinan menurun dari 8,75% menjadi 5,65%.
- Penurunan sebesar -3,1%, menunjukkan adanya perhatian terhadap pertumbuhan populasi dan akses ekonomi.

VII. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN : ANGGARAN BERBASIS EKOLOGIS



VII. Pembangunan Lingkungan : Anggaran Berbasis Ekologis

Pembangunan berbasis ekologis menjadi salah satu misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Salah satu misi dalam RPJPN adalah “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,” yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap berbagai guncangan. Misi ini sejalan dengan kebutuhan mendesak di Provinsi Banten untuk menangani tantangan ekologis yang meliputi pencemaran udara, kerusakan sumber daya air, pengelolaan limbah, dan eksplorasi tambang pasir.

Kondisi lingkungan di Banten menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data, pencemaran udara dari PLTU Suralaya menyebabkan sekitar 1,470 kematian dini per tahun serta kerugian ekonomi hingga Rp14,2 triliun. Sungai-sungai utama seperti Ciujung dan Cisadane tercemar limbah industri, yang tidak hanya merusak kualitas air tetapi juga mengancam ekosistem mangrove dan terumbu karang. Selain itu, aktivitas tambang pasir di Serang dan Lebak menyebabkan erosi, sedimentasi, serta hilangnya habitat alami.

Namun, keberpihakan pemerintah terhadap isu ekologis di Banten masih jauh dari memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2024 mengalokasikan hanya Rp209,75 miliar atau 1.8% dari total belanja untuk program pelestarian lingkungan. Dari jumlah ini, hanya Rp 310 juta atau 0.15% digunakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Minimnya alokasi anggaran ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah lingkungan hidup.

Indeks Kemandirian Daerah (IKD) yang menunjukkan ketergantungan besar pada transfer dana pusat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ekologi yang membutuhkan pendanaan mandiri. Oleh karena itu, penerapan skema insentif fiskal berbasis ekologi seperti Ecological Fiscal Transfer (EFT) sangat relevan. EFT dapat memberikan insentif kepada daerah untuk melindungi lingkungan dengan memasukkan indikator ekologis ke dalam formula alokasi fiskal.

Selain itu, implementasi skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dapat menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan IPM di wilayah seperti Pandeglang dan Lebak. EFT memungkinkan alokasi dana yang lebih berbasis indikator ekologis, yang tidak hanya membantu pelestarian lingkungan tetapi juga

memperbaiki infrastruktur kesehatan dan pendidikan di daerah dengan capaian IPM rendah yang didominasi wilayah agraris.

Kesimpulan

1. **Kerusakan Ekologis yang Serius:** PLTU Suralaya menyumbang polusi udara signifikan, menyebabkan kematian dini dan kerugian ekonomi yang besar. Pencemaran sungai Ciujung dan Cisadane mengancam sumber daya air dan ekosistem laut.
2. **Anggaran Tidak Memadai:** Dari total belanja daerah, hanya 1.8% dialokasikan untuk program pelestarian lingkungan, dengan 0.15% untuk pencegahan pencemaran.
3. **Ketergantungan Fiskal Tinggi:** Rendahnya IKD mencerminkan ketergantungan besar pada transfer pusat untuk mendanai program pembangunan. Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang berpotensi memaksimalkan alokasi anggaran belum diimplementasikan, padahal dapat membantu mengarahkan dana ke program pelestarian lingkungan yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekologi.

Rekomendasi

1. **Peningkatan Efisiensi Anggaran Ekologis:**
 - Menyusun prioritas program pelestarian dengan alokasi anggaran yang terukur untuk pengelolaan limbah dan penghijauan.
2. **Implementasi Ecological Fiscal Transfer (EFT):**
 - Memasukkan indikator lingkungan ke dalam formula Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendorong pelestarian yang lebih efektif.
3. **Diversifikasi Ekonomi Berbasis Ekologi:**
 - Mengembangkan pariwisata alam dan jasa lingkungan untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada sektor industri yang merusak lingkungan.
4. **Kolaborasi Lintas Sektor:**
 - Melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam pelaksanaan program lingkungan yang berbasis data.

Data Pendukung (Banten)

1. **Anggaran Ekologis (2024):**
 - Total anggaran: Rp209,75 miliar (1.8% dari total APBD).

- Pencegahan pencemaran: Rp 310 juta (0.15% dari total belanja ekologi).

2. Dampak Lingkungan dari Industri:

- **PLTU Suralaya:** Polusi udara menyebabkan 1,470 kematian dini dan kerugian ekonomi Rp14,2 triliun per tahun.
- **Sungai Ciujung dan Cisadane:** Limbah beracun dari industri mengancam kualitas air dan ekosistem mangrove.

VIII. PEMBANGUNAN SOSIAL : KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



VIII. Pembangunan Sosial : Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang kompleks, mencerminkan keberhasilan awal dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus yang dilaporkan melalui kanal resmi SIMFONI PPA, cenderung menurun mencapai 894 kasus pada tahun 2024, jumlah kasus ini berpeluang semakin bertambah di akhir tahun, Sebagian besar laporan kasus terjadi di wilayah urban seperti Kota Tangerang Selatan dan kota Tangerang, dari jumlah kasus yang korban alami berdasarkan bentuk kekerasan lebih banyak dalam bentuk fisik, dan psikis, dua daerah tersebut yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan pelaporan, angka tinggi ini juga menggarisbawahi tantangan besar dalam sistem perlindungan dan penanganan kekerasan di Banten.

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kasus. Banyak kasus kekerasan seksual yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice atau berlarut-larut dalam proses hukum, menyebabkan korban dan keluarganya enggan untuk melapor. Ketidakjelasan prosedur, intimidasi terhadap korban, dan kurangnya penghargaan bagi APH yang menyelesaikan kasus secara tuntas memperburuk situasi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya integrasi antar lembaga terkait, serta minimnya personil profesional di UPTD PPA yang mampu memberikan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan rehabilitasi.

Victim blaming juga menjadi salah satu isu serius di masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Kasus yang pernah ditangani oleh PATTIRO Banten menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di sekolah justru mendapatkan stigma, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tidak hanya menambah beban psikologis korban tetapi juga menghancurkan peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan. Sikap lembaga pendidikan yang cenderung menyalahkan korban menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam penanganan kasus kekerasan di sekolah, termasuk penerapan kebijakan yang melindungi korban secara tegas dan memastikan hak-hak pendidikan mereka terpenuhi.

Kanal pelaporan seperti SIMANIS yang dirancang untuk mempermudah pengaduan masyarakat belum berjalan optimal. Dengan teknologi yang usang dan sosialisasi yang minim, kanal ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses teknologi terbatas. Selain itu, budaya victim-blaming yang masih kuat di masyarakat menciptakan hambatan psikologis bagi korban untuk berbicara atau mencari bantuan.

Tabel 10
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Daerah	Jumlah kasus	Fisik	psikis	Kasus masih berproses	Kejadian Rumah tangga	Pengaduan	Kesehatan	Rehabilitasi sosial	Pemulangan	0-5	13-17	25-44	60+	kekerasan dialami 1	kekerasan dialami 2	kekerasan dialami 3
Pandeglang	55	13	1	1	50	55	40	0	0	5	25	8	0	51	4	0
Lebak	98	25	7	97	93	90	0	1	0	5	50	16	0	98	0	0
Tangerang	27	2	2	27	13	27	8	0	0	3	13	2	0	22	5	0
Serang	81	15	5	72	70	81	54	0	0	17	38	10	0	74	7	0
Kota Tangerang	189	75	40	187	142	189	54	2	0	17	45	60	0	166	18	4
Tangerang Selatan	292	96	9	102	144	292	121	0	0	24	68	56	2	75	196	5
Kota Serang	35	16	9	32	19	35	1	0	0	1	15	8	0	24	9	2
Kota Cilegon	117	54	10	272	53	117	80	1	0	9	35	30	0	21	82	12

Sumber: UPTD PPA Banten

Data dan Analisis Perbandingan

Provinsi Banten

- Kasus Kekerasan (2024): 894 kasus (Cenderung turun tapi ada indikasi peningkatan di akhir tahun)

Kabupaten Pandeglang

- Kasus Kekerasan (2024): 55 kasus (kasusnya lebih banyak di rumah tangga).

Kabupaten Lebak

- Kasus Kekerasan (2024): 98 kasus (dengan jumlah pelayanan kesehatan yang rendah).

Kabupaten Serang

- Kasus Kekerasan (2024): 81 kasus (jumlah kasus penyelesaian masih tinggi yang belum ditangani).

Kabupaten Tangerang

- Kasus Kekerasan (2024): 27 kasus (termasuk daerah jumlah kasus yang belum selesai terendah di Banten).

Kota Serang

- Kasus Kekerasan (2024): 35 kasus (dengan pelayanan kesehatan terendah).

Kota Cilegon

- Kasus Kekerasan (2024): 117 dengan, (Jumlah kekerasan yang dialami 3 jenis dalam 1 kasus)

Kota Tangerang

- Kasus Kekerasan (2024): 189 kasus (didominasi korban berusia 25-44 tahun).

Kota Tangerang Selatan

- Kasus Kekerasan (2024): 292 kasus (dominan kekerasan psikis)

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Peningkatan Kanal Pelaporan dan Layanan:

- Mengoptimalkan platform SIMANIS dengan pembaruan teknologi dan pelatihan petugas di daerah terpencil.
- Memperluas akses layanan bantuan hukum dan psikologis untuk korban.

2. Peningkatan Penegakan Hukum:

- Memberikan penghargaan bagi APH yang menyelesaikan kasus kekerasan secara cepat dan tuntas.
- Menghapus pendekatan restorative justice untuk kasus kekerasan seksual dan mempercepat proses peradilan.
- Memastikan perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung.

3. Pencegahan Kekerasan:

- Meningkatkan kesadaran melalui kampanye berbasis komunitas di wilayah dengan tingkat pelaporan rendah.
- Melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mengurangi stigma terhadap korban.

4. Intervensi Sosial dan Ekonomi:

- Memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi bagi perempuan rentan untuk mengurangi ketergantungan.
- Mengembangkan pusat-pusat perlindungan bagi korban di semua kabupaten/kota.

5. Reformasi di Lingkungan Pendidikan:

- Menghapus budaya victim blaming di sekolah melalui pelatihan khusus untuk tenaga pendidik.
- Menerapkan kebijakan tegas yang milarang diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual.
- Menyediakan konseling psikologis di setiap sekolah untuk mendukung pemulihian korban.
- Menjamin hak pendidikan bagi korban, termasuk melindungi mereka dari sanksi tidak adil seperti dikeluarkan dari sekolah.

6. Penguatan Kapasitas UPTD PPA:

- Menambah jumlah personil profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial.
- Meningkatkan kapasitas personil melalui pelatihan berkala.

Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, Provinsi Banten dapat mengurangi angka kekerasan secara signifikan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan dan anak.

IX. PEMBANGUNAN PRIORITAS : 24 PEMBANGUNAN DESA TERENDAH



IX. Pembangunan Prioritas: 24 Pembangunan Desa Terendah

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, desa menjadi pondasi utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan yang merata dan berkeadilan di tingkat desa menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Provinsi Banten, keberagaman kondisi desa menunjukkan tantangan yang beragam pula, mulai dari masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Melalui prioritas pembangunan, pemerintah dapat mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan perhatian lebih dan merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah di Provinsi Banten yang membutuhkan perhatian khusus berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu nilai Indeks Desa Membangun (IDM), jumlah anak tidak sekolah, jumlah keluarga prasejahtera, dan angka stunting. Indikator-indikator ini dipilih karena mencerminkan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di desa-desa Banten.

IDM adalah ukuran yang digunakan untuk mengkategorikan desa-desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya. IDM terdiri dari tiga dimensi utama yaitu dimensi ketahanan sosial yang mencerminkan kondisi pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Dimensi ketahanan ekonomi yang menggambarkan keberlanjutan ekonomi desa, termasuk pendapatan dan pekerjaan. Dan dimensi ketahanan lingkungan yang menilai kelestarian dan pengelolaan sumber daya alam di desa.

Berdasarkan IDM, desa dapat dikategorikan sebagai desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal. Di Provinsi Banten, masih banyak desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pembangunan yang lebih intensif untuk mendorong desa-desa tersebut naik ke kategori yang lebih baik.

Anak yang tidak bersekolah menjadi perhatian utama karena rendahnya partisipasi pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang memiliki jumlah anak tidak sekolah yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa perlu ada kebijakan yang mendorong akses pendidikan,

seperti program beasiswa, sekolah gratis, atau pengadaan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Kondisi keluarga pra sejahtera mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang mencatat jumlah keluarga prasejahtera yang signifikan. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial perlu difokuskan pada daerah-daerah ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Stunting, yang merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis, berdampak langsung pada kesehatan dan kemampuan kognitif anak-anak. Kota Serang dan Kabupaten Tangerang memiliki angka stunting yang tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan program gizi, seperti pemberian makanan tambahan bergizi dan edukasi kesehatan ibu dan anak.

Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk menjawab kebutuhan tiap wilayah. Selain itu, peningkatan Indeks Desa Membangun di desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal perlu menjadi prioritas utama untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh Provinsi Banten.

**Tabel 11
24 Desa Prioritas**

No	Daerah	Kecamatan	Kelurahan	Normalisasi Nilai				Bobot				Hasil
				ATS	Stunting	Prasejahtera	IDM (2023)	ATS	Stunting	Prasejahtera	IDM	
1	Lebak	leuwidamar	kanekes	1,0000	0,2899	0	0,9988	0,1500	0,0435	0,0000	0,4994	0,6929
2	Pandeglang	cigeulis	ciseureuhheun	0	0	1,0000	0,6697	0,0000	0,0000	0,2000	0,3348	0,5348
3	Tangerang	pasarkemis	sindangsari	0,0118	0,5266	0,1251	0,8200	0,0018	0,0790	0,0250	0,4100	0,5158
4	Pandeglang	cibatiung	curug	0,0000	0	0,0307	1,0000	0,0000	0,0000	0,0061	0,5000	0,5061
5	Lebak	cigemlong	cikaret	0,0118	0,0642	0,0043	0,9588	0,0018	0,0096	0,0009	0,4794	0,4917
6	Tangerang	panongan	ciakar	0,0009	0,3505	0,4227	0,7018	0,0001	0,0526	0,0845	0,3509	0,4881
7	Lebak	bojongmanik	mekarmanik	0,0000	0,1248	0,1029	0,8887	0,0000	0,0187	0,0206	0,4444	0,4837
8	Lebak	cigemlong	cikadongdong	0,0271	0,0257	0,0765	0,9043	0,0041	0,0039	0,0153	0,4522	0,4754
9	Lebak	muncang	pasirnangka	0	0,0202	0,0602	0,9043	0,0000	0,0030	0,0120	0,4522	0,4672
10	Tangerang	sepatantimur	gempolsari	0	0,6587	0,1036	0,6939	0,0000	0,0988	0,0207	0,3470	0,4665
11	Lebak	citeles	banjarsari	0,0005	0,1138	0,0804	0,8599	0,0001	0,0171	0,0161	0,4299	0,4631
12	Pandeglang	cikeusik	cikadongdong	0,0023	0	0,0494	0,9043	0,0003	0,0000	0,0099	0,4522	0,4624
13	Tangerang	sindangjaya	sukaharja	0	0,2183	0,3845	0,7049	0,0000	0,0328	0,0769	0,3525	0,4621
14	Lebak	cibadak	cisangu	0,0005	0,2018	0,1078	0,8194	0,0001	0,0303	0,0216	0,4097	0,4616
15	Lebak	banjarsari	kertarahayu	0,0000	0,0092	0,0277	0,9053	0,0000	0,0014	0,0055	0,4526	0,4596
16	Pandeglang	cibatiung	sorongan	0	0	0,3183	0,7886	0,0000	0,0000	0,0637	0,3943	0,4580
17	Lebak	warunggunung	banjarsari	0	0,1193	0,0454	0,8599	0,0000	0,0179	0,0091	0,4299	0,4569
18	Tangerang	teluknaga	keboncau	0,0140	0,0037	0,4099	0,7419	0,0021	0,0006	0,0820	0,3709	0,4556
19	Pandeglang	picung	ganggaeng	0	0	0,0504	0,8876	0,0000	0,0000	0,0101	0,4438	0,4539
20	Lebak	cigemlong	wangunjaya	0,0407	0,0092	0,0129	0,8787	0,0061	0,0014	0,0026	0,4394	0,4494
21	Lebak	sajira	sukamarga	0	0,0477	0,0305	0,8701	0,0000	0,0072	0,0061	0,4350	0,4483
22	Pandeglang	saketi	mekarwangi	0	0,0972	0,0236	0,8576	0,0000	0,0146	0,0047	0,4288	0,4481
23	Lebak	cibadak	bojongcae	0,0317	0,1688	0,0415	0,8127	0,0048	0,0253	0,0083	0,4064	0,4447
24	Lebak	lebakgedong	banjarsari	0,0023	0,0202	0,0421	0,8599	0,0003	0,0030	0,0084	0,4299	0,4417

Sumber: Diolah

Berdasarkan perhitungan terdapat 24 desa di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Tangerang direkomendasikan sebagai prioritas pembangunan berdasarkan indikator

angka putus sekolah, jumlah stunting, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan Indeks Desa Membangun (IDM). Kabupaten Lebak mencatat jumlah desa prioritas terbanyak, yaitu 14 desa, dengan Desa Kanekes sebagai salah satu desa dengan skor prioritas tertinggi. IDM Desa Kanekes merupakan paling tertinggi di Banten, tingginya angka putus sekolah juga menjadi tantangan serius. Desa-desa lain, seperti Cikaret dan Cikadongdong, juga menghadapi kombinasi masalah pendidikan dan kesejahteraan, yang membutuhkan intervensi mendalam untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Di Kabupaten Pandeglang, enam desa menjadi fokus pembangunan, termasuk Desa Ciseureuheun dan Sorongan. Tantangan utama di wilayah ini adalah tingkat kesejahteraan yang rendah dan tingginya stunting. Di sisi lain, empat desa di Kabupaten Tangerang, seperti Desa Gempol Sari dan Sindangsari, juga mencatat angka stunting yang signifikan. Meskipun angka putus sekolah di Tangerang relatif lebih rendah dibandingkan dua kabupaten lainnya, peningkatan nilai IDM di beberapa desa tetap diperlukan intervensi untuk menciptakan pembangunan yang merata. Pendekatan terpadu berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan program pemberdayaan ekonomi sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini.

X. KESIMPULAN



X. Kesimpulan

Perbandingan kinerja pembangunan selama 10 tahun dan 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa wilayah urban memiliki kapasitas lebih baik untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, wilayah agraris seperti Pandeglang dan Lebak memerlukan intervensi besar dalam diversifikasi ekonomi, peningkatan layanan dasar, dan pengelolaan lingkungan.

Kemandirian Daerah

- **Kota Tangerang dan Tangerang Selatan:**

- Kemandirian fiskal tertinggi selama 10 tahun terakhir dengan rata-rata Indeks Kemandirian Keuangan Daerah (IKKD) di atas 50% (2022-2024). Kota Tangerang Selatan mencatat kenaikan dari 44,62% (2014) menjadi 54,74% (2024).
- Sektor jasa dan perdagangan menjadi penopang utama, dengan stabilitas fiskal yang baik.

- **Kabupaten Pandeglang dan Lebak:**

- Masih berada pada tingkat kemandirian fiskal terendah dengan IKKD rata-rata di bawah 15% selama 10 tahun terakhir. Pandeglang naik dari 8,02% (2014) menjadi 11,27% (2024), sedangkan Lebak stagnan di sekitar 14%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- **Wilayah Maju:**

- **Kota Tangerang Selatan:** Kenaikan IPM sebesar 4,14 poin dalam 10 tahun (2014-2024) menjadi 83,24. Dalam 3 tahun terakhir, kenaikan sebesar 0,76 poin menunjukkan kestabilan pembangunan manusia.
- **Kota Tangerang:** IPM meningkat sebesar 4,98 poin menjadi 81,62, dengan pertumbuhan 0,77 poin dalam 3 tahun terakhir.

- **Wilayah Tertinggal:**

- **Kabupaten Pandeglang dan Lebak:** IPM naik masing-masing sebesar 5,64 poin dan 5,43 poin dalam 10 tahun terakhir, tetapi masih rendah di 66,99. Pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir hanya sebesar 1,35 dan 1,08 poin, menandakan perlambatan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

- **Wilayah Maju:**

- **Kota Tangerang Selatan:** LPE stabil di 5,65% pada 2024, dengan rata-rata tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi juga terlihat.
- **Kabupaten Pandeglang:** Meskipun agraris, pertumbuhan ekonomi melonjak hingga 7,91% pada 2024.

- **Wilayah Tertinggal:**

- **Kota Cilegon:** Mengalami kontraksi ekonomi signifikan, dari 6,69% (2014) menjadi 4,03% (2024), akibat ketergantungan tinggi pada sektor industri.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- **Wilayah Maju:**

- **Kabupaten Tangerang:** Penurunan TPT terbesar dalam 10 tahun terakhir, dari 11,94% (2014) menjadi 6,94% (2024). Ini menunjukkan keberhasilan diversifikasi ekonomi.

- **Wilayah Tertinggal:**

- **Kabupaten Serang:** TPT tetap tinggi, hanya menurun dari 13,69% menjadi 9,94% dalam 10 tahun terakhir, mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja.

Tingkat Kemiskinan

- **Wilayah Maju:**

- **Kota Tangerang Selatan:** Tingkat kemiskinan terendah, hanya 2,36% pada 2024, menunjukkan stabilitas sosial ekonomi.

- **Wilayah Tertinggal:**

- **Kabupaten Pandeglang:** Tingkat kemiskinan tertinggi, turun dari 10,25% (2014) menjadi 9,18% (2024), tetapi laju penurunan relatif lambat.

Pembangunan Berbasis Ekologi

- **Krisis Ekologis:** Kerusakan lingkungan di Banten sangat serius, dengan pencemaran udara dari PLTU Suralaya menyebabkan 1.470 kematian dini per tahun dan kerugian ekonomi hingga Rp14,2 triliun. Pencemaran sungai utama seperti Ciujung dan Cisadane berdampak pada kualitas air dan ekosistem.

- **Minimnya Komitmen Pemerintah:** Hanya 1,8% dari APBD dialokasikan untuk program pelestarian lingkungan, dengan pencegahan pencemaran hanya mendapat 0,15%.
- **Ketergantungan Fiskal:** Rendahnya kemandirian fiskal daerah menjadi hambatan besar dalam pendanaan program ekologis.

Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

- **Tingginya Kasus Kekerasan:** Tahun 2024 mencatat 894 kasus kekerasan, terutama di wilayah urban seperti Tangerang dan Tangerang Selatan, yang dominan berupa kekerasan psikis dan fisik.
- **Hambatan Penanganan:** Lemahnya penegakan hukum, minimnya integrasi antar lembaga, dan budaya victim blaming memperburuk situasi korban. Kanal pelaporan SIMANIS belum optimal akibat teknologi usang dan kurangnya sosialisasi.

Rekomendasi Teknis

1. Pembangunan Ekologis:

- **Optimalisasi Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT):** Mengintegrasikan indikator ekologis dalam formula dana insentif daerah untuk mendorong perlindungan lingkungan.
- **Pemulihan Ekosistem:** Rehabilitasi sungai yang tercemar, seperti Ciujung dan Cisadane, serta restorasi mangrove di kawasan pesisir.
- **Teknologi Pengolahan Limbah:** Mewajibkan industri besar untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan guna mengurangi pencemaran udara dan air.

2. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan:

- **Peningkatan Kapasitas Layanan Perlindungan:** Menambah jumlah psikolog, pekerja sosial, dan konselor hukum di UPTD PPA.
- **Digitalisasi Kanal Pelaporan:** Memperbarui teknologi SIMANIS dan menyediakan aplikasi berbasis smartphone untuk mempermudah pelaporan kasus.
- **Edukasi Berbasis Komunitas:** Membangun kampanye berbasis komunitas untuk mengurangi stigma terhadap korban kekerasan.

3. Kemandirian Keuangan Daerah:

- **Diversifikasi Ekonomi:** Mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam di wilayah agraris seperti Pandeglang dan Lebak.
- **Digitalisasi Pengelolaan PAD:** Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui sistem digital untuk meningkatkan efisiensi.
- **Infrastruktur Pendukung Ekonomi:** Peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung perdagangan dan investasi lokal.

4. Ketimpangan Sosial dan Pembangunan Manusia:

- **Akses Pendidikan di Wilayah Agraris:** Membangun sekolah baru di daerah terpencil serta menyediakan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah tersebut.
- **Program Nutrisi Stunting:** Meluncurkan program distribusi paket nutrisi dan pelatihan gizi di daerah dengan angka stunting tinggi seperti Kabupaten Serang dan Tangerang.
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan lokal untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai.

5. Kolaborasi dan Mitigasi Bencana:

- **Infrastruktur Tahan Bencana:** Membangun infrastruktur tahan banjir di wilayah rawan bencana seperti Lebak dan Pandeglang.
- **Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas:** Mengadakan program pelatihan tanggap darurat berbasis masyarakat.
- **Koordinasi Lintas Sektor:** Mengintegrasikan sistem pemantauan risiko bencana antara pemerintah daerah dan pusat.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pembangunan Ekologis:

- **Regulasi Industri Ramah Lingkungan:** Mewajibkan semua perusahaan besar untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat, dengan sanksi berat bagi pelanggar.
- **Anggaran Hijau:** Meningkatkan alokasi anggaran pelestarian lingkungan menjadi minimal 5% dari total APBD.
- **Incentive-Based Policy:** Memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil meningkatkan indikator ekologis.

2. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan:

- **Percepatan Proses Hukum:** Menghapus pendekatan restoratif untuk kasus kekerasan seksual dan mempercepat proses peradilan.
- **Perda Perlindungan Korban:** Mewajibkan setiap daerah memiliki Perda yang menjamin perlindungan penuh bagi korban kekerasan.
- **Penguatan Sistem Perlindungan:** Membentuk unit khusus di APH untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender.

3. Kemandirian Keuangan Daerah:

- **Insentif PAD:** Memberikan penghargaan fiskal kepada daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian keuangan melalui optimalisasi PAD.
- **Dana Khusus Diversifikasi Ekonomi:** Mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan sektor ekonomi baru di wilayah agraris.
- **Kebijakan Transformasi Digital:** Mewajibkan digitalisasi layanan perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

4. Ketimpangan Sosial dan Pembangunan Manusia:

- **Skema Beasiswa Berbasis Daerah:** Menerapkan program beasiswa khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah agraris.
- **Kebijakan Zero Stunting:** Memprioritaskan alokasi anggaran kesehatan untuk penguatan program gizi dan sanitasi di daerah rawan stunting.
- **Kurikulum Anti Kekerasan:** Menambahkan materi edukasi tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan dalam kurikulum sekolah.

5. Kolaborasi dan Mitigasi Bencana:

- **Regulasi Infrastruktur Tahan Bencana:** Mewajibkan semua proyek pembangunan baru memenuhi standar tahan bencana.
- **Dana Siaga Bencana:** Membentuk dana khusus untuk mitigasi dan tanggap darurat di wilayah rawan bencana.
- **Kampanye Tanggap Bencana:** Melibatkan media dan tokoh masyarakat dalam kampanye kesadaran kesiapsiagaan bencana.